

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Defisit Transaksi Berjalan

##### 1. Definisi defisit transaksi berjalan

Defisit transaksi berjalan adalah jumlah ekspor yang lebih sedikit dari pada impor. Defisit transaksi berjalan diduga mempengaruhi utang luar negeri karena, jika besarnya transaksi berjalan melebihi surplus neraca modal akan mengakibatkan defisit neraca pembayaran (BOP), yang berarti juga cadangan devisa berkurang, maka suatu negara akan kekurangan modal untuk membiayai impor barang-barang baru dan untuk kebutuhan kegiatan produksi dalam negeri, jika sudah terjadi seperti itu maka dibutuhkanlah modal dari luar negeri.<sup>1</sup>

Neraca transaksi berjalan (*current account*) adalah transaksi internasional yang mencakup transaksi barang dan jasa. Neraca perdagangan Indonesia ditunjukkan oleh ekspor barang lebih besar dari impor barang sehingga neraca perdagangan surplus USD 23,708 miliar. Sebaliknya jika ekspor barang lebih kecil dari impor neraca perdagangan disebut defisit. Setiap surplus atau defisit dari transaksi berjalan harus di seimbangkan dengan transaksi modal. Surplus transaksi berjalan berarti meminjamkan dan (*lending fund*) ke luar negeri

---

<sup>1</sup>Tulus Th Tambunan, *Perekonomian Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 249

dan defisit transaksi berjalan berarti meminjam dana dari luar negeri.<sup>2</sup>

Neraca transaksi berjalan menjelaskan bahwa apakah kombinasi klaim sektor swasta dan pemerintah terhadap asset luar negeri naik atau turun. Surplus berarti klaim sektor swasta dan pemerintah naik terhadap asset luar negeri, begitupun sebaliknya. Neraca transaksi berjalan juga menunjukkan berapa banyak total tabungan melebihi investasi pemerintah dan swasta.

Pada posisi BOP (*Balance of Payment*) yang ideal untuk suatu negara adalah bila berada pada posisi surplus atau equilibrium yang nilai valasnya relatif tinggi, sedangkan pada posisi yang dianggap kurang baik dan selalu diusahakan untuk perbaikan melalui mekanisme adjustment BOP adalah posisi BOP yang defisit dan nilai valas yang relatif rendah.<sup>3</sup>

Dalam kenyataan sehari-hari, perdagangan luar negeri disuatu negara yang seimbang sangat jarang terjadi. Selisih antara ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa dicatat pada sebuah neraca yang disebut neraca transaksi berjalan (*current account*) dengan simbol CA. Secara matematik definisi CA adalah.<sup>4</sup>

$$CA = EX - IM$$

---

<sup>2</sup>Jonni Manurung, *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 13

<sup>3</sup>Apridar, *Ekonomi Internasional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 149

<sup>4</sup> Paul R Krugman, Maurice Obstfeld, *Ekonomi internasional* (Jakarta: Indeks, 2005) 13

Apabila impor suatu negara melebihi eksportnya maka negara itu kita sebut mengalami *defisit transaksi berjalan* (*current account deficit*). Suatu negara disebut mengalami *surplus transaksi berjalan* (*current account surplus*) bila eksportnya lebih besar dari pada impornya.

Neraca transaksi berjalan adalah bagian BOP yang memberi gambaran ringkas tentang transaksi barang dan jasa yang di produksi selama periode setahun atau kurang. Dapat juga dikatakan neraca transaksi berjalan adalah bagian dari BOP yang memberi gambaran ringkas tentang pembayaran-pembayaran jangka pendek.

## **2. Komponen-komponen transaksi berjalan**

Neraca transaksi berjalan dapat dibedakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu neraca perdagangan (balance of trade) serta neraca jasa dan neraca non balas jasa.<sup>5</sup>

- a. Neraca perdagangan dicatat transaksi ekspor dan impor barang-barang selama satu periode. Suatu negara dikatakan mengalami defisit perdagangan apabila nilai ekspor barang lebih kecil dari pada nilai impor barang. Sebaliknya negara tersebut dikatakan mengalami surplus perdangan bila nilai ekspor barang lebih besar dari pada nilai impor.
- b. Neraca jasa mencatat ekspor dan impor jasa selama suatu periode tertentu. Impor jasa yang dilakukan misalnya penggunaan jasa transportasi negara lain untuk mengirim barang atau kegiatan lain. Ekspor jasa terjadi bila ada

---

<sup>5</sup> Pratama Rahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikro Dan Makro*, Edisi Ketiga (Jakarta : LPFUI, 2008), 300-301

pembelian jasa-jasa dalam negeri oleh pihak asing yang juga dicatat dalam neraca jasa adalah pendapatan modal (*investment income*), yaitu pendapatan yang diperoleh karena memiliki aset-aset finansial (saham dan obligasi) serta aset fisik (properti) di negara lain. Suatu negara mengalami defisit neraca jasa apabila impor jasa lebih besar daripada eksportnya. Sebaliknya bila ekspor lebih besar dari pada impor jasa dikatakan mengalami surplus neraca jasa

- c. Neraca non balas jasa (*transfer payment*) mencatat transaksi-transaksi yang bukan sebagai akibat balas jasa.

Surplus atau defisit neraca transaksi berjalan adalah penggabungan surplus dan defisit neraca perdagangan dengan neraca jasa dan non balas jasa. Suatu negara dikatakan mengalami surplus neraca transaksi berjalan bila total ekspor barang dan jasa lebih kecil dari pada impor barang dan jasa. Defisit neraca transaksi berjalan menunjukkan bahwa pembayaran-pembayaran jangka pendek suatu negara lebih besar dari pada penerimaan-penerimaannya. Begitu juga sebaliknya bila suatu negara mengalami defisit transaksi berjalan.

Tiga komponen lain dalam transaksi berjalan adalah pembayaran atau penerimaan dari pendapatan investasi, pembelian atau penjualan jasa dan transfer unilateral seperti hadiah, pensiun dan bantuan luar negeri.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Jonni Manurung, *Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Moneter...*, 269

### 3. Penyebab Defisit Transaksi Berjalan

Ada tiga persoalan pokok yang dapat menimbulkan defisit dalam transaksi berjalan yaitu: neraca perdagangan lebih besar dari surplus neraca jasa, defisit neraca jasa lebih besar dari surplus neraca perdagangan, defisit neraca perdagangan disertai neraca jasa. Tiga persoalan ini menunjukkan ringan beratnya defisit dalam transaksi berjalan. Jika Indonesia mengalami defisit tergolong pada tingkat kedua yaitu defisit neraca jasa lebih besar dari pada surplus neraca perdagangan. Jika suatu negara anggota IMF mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran, misalnya defisit transaksi berjalan membesar, maka diberi jatah SDR untuk ditukarkan dengan valuta yang dibutuhkan. Hak kredit ini disebut *drawing right*. Defisit transaksi berjalan yang mulai terjadi sejak triwulan keempat 2011 masih berlanjut pada tahun 2013 dan diikuti dengan nilai defisit yang membesar.<sup>7</sup>

## B. Utang Luar Negeri

### 1. Definisi utang luar negeri

Utang luar negeri merupakan sumber modal bagi negara yang sedang melakukan pembangunan ekonomi, tak terkecuali negara yang kaya sumber daya alam dan memiliki penduduk yang besar, seperti Indonesia, India dan RRC.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Jilius R latumaerisa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Global* (Mitra Wacana Media: Jakarta, 2015), 277-278

<sup>8</sup> Ahmad Mahyudi, *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 275

Menurut Lincoln (2007) Utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan anggaran pemerintah dan pembangunan ekonomi secara umum digunakan selain penerimaan dalam negeri pemerintah. Pemanfaatan utang luar negeri pemerintah untuk membiayai belanja negara sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan-kegiatan yang produktif.<sup>9</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pinjaman berarti utang yang dipinjam dari pihak lain dengan kewajiban di bayarkan kembali. Jadi dapat diartikan pinjaman luar negeri adalah pinjaman yang berasal dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan wajib dibayarkan kembali.

Utang swasta (*nonguaranteed debt*) adalah utang yang dilakukan oleh debitur swasta dimana utang tersebut tidak dijamin oleh pemerintah yang otonom. Utang luar negeri yang berasal dari kreditur swasta bisa pula berwujud pinjaman dari bank-bank komersial, obligasi dan lain-lain.<sup>10</sup>

Utang luar negeri dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain:<sup>11</sup>

- a. Dari segi jangka waktu, pinjaman luar negeri terdiri atas pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman jangka waktu samapai 5 tahun. Pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman dengan jangka waktu 5 tahun sampai 15 tahun. Pinjaman

---

<sup>9</sup>Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: Indeks, 2010), 239

<sup>10</sup>Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2014), 187

<sup>11</sup>Jilius R Latumaerissa, *Perekonomian Indonesia...*, 241-242

jangka panjang, yaitu pinjaman dengan jangka waktu diatas 15 tahun.

- b. Dari segi status dana pinjaman, terdiri dari pinjaman pemerintah dan swasta
- c. Dari segi sumber dana pinjaman, terdiri atas pinjaman dari negara-negara dalam kerangka IGGI/CGI berupa pinjaman multilateral, yaitu pinjaman yang berasal dari badan-badan keuangan internasional dan regional seperti world bank, international bank for reconstruction and development (IBRD) dan asian development bank ( ADB) yang pada dasarnya pinjaman bersyarat ringan. Pinjaman bilateral yaitu pinjaman yang berasal dari pemerintah suatu negara melalui suatu lembaga atau badan keuangan yang dibentuk oleh negara bersangkutan. Pinjaman dari negara-negara yang tergabung dalam kelompok non IGGI/CGI berupa pinjaman yang berada dari negara maupun lembaga atau badan keuangan internasional dan regional yang bukan anggota CGI, baik dari pinjaman multilateral maupun pinjaman yang berasal dari pemerintah suatu Negara
- d. Dari segi persyaratan pinjaman, terdiri atas:
  - 1) Pinjaman lunak (concessional loan), Merupakan pinjaman yang berasal dari lembaga multilateral maupun negara bilateral yang dananya berasal dari iuran anggota (untuk multilateral) atau dari anggaran negara yang bersangkutan (untuk bilateral) dan ditunjukan untuk meningkatkan pembangunan, sehingga tingkat bunganya rendah (maksimum 3,5%), jangka waktu pengembalian

25 tahun atau lebih dan masa tenggang (grace period) cukup panjang (sekurang-kurangnya tujuh tahun). Selain itu, biasanya pinjaman lunak mengandung hibah (grant) sekurang-kurangnya 35% dari total pinjaman.

- 2) Pinjaman setengah lunak (semi concessional loan). Merupakan pinjaman yang memiliki persyaratan pinjaman yang sebagian lunak dan sebagian lagi komersial. Bentuk pinjaman yang masuk dalam kategori ini adalah fasilitas kredit ekspor dan purchasing and installment sales agreement (PISA).
  - 3) Pinjaman komersial. Merupakan pinjaman yang bersumber dari bank atau lembaga keuangan dengan persyaratan uang berlaku di dasar internasional pada umumnya.
- e. Dari segi bentuk pinjaman yang diterima, terdiri atas bantuan proyek yang merupakan bantuan luar negeri yang digunakan untuk keperluan proyek pembangunan dengan cara memasukkan barang modal, barang, jasa. Bantuan teknik yaitu bantuan luar negeri dalam bentuk penguasaan tenaga-tenaga ahli dari negara donor ke negara berkembang dalam rangka alih teknologi atau pemberian peralatan untuk pelaksanaan proyek, juga dalam bentuk pelatihan dalam bentuk pelatihan pendidikan kepada tenaga domestik didalam dan di luar negeri. Bantuan program, yaitu bantuan luar negeri yang berupa devisa kredit, bantuan pangan, dan bantuan non pangan. Penggunaannya diserahkan kepada



pemerintah indonesia sendiri. Dana rupiah bantuan program digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

## **2. Indikator Utang Luar Negeri**

- a. Debt Service Ratio (DSR): rasio antara pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri terhadap penerimaan ekspor
- b. Debt Ekspirr Ratio (DER): rasio anatar total utang luar negeri dengan penerimaan ekspor.
- c. Debt GNP Ratio (DGNP): rasio antaar total utang luar negeri terhadap produk nasional bruto.<sup>12</sup>

## **3. Penyebab utang luar negeri**

Sejak krisis utang luar negeri dunia pada awal 1980-an, masalah utang luar negeri yang dialami oleh banyak negara berkembang tidak semakin baik. Banyak negara berkembang semakin terjermus kedalam krisis utang luar negeri sampai negara-negara pengutang besar terpaksa melakukan program-program penyesuaian struktural terhadap ekonomi mereka atas desakan dari bank indonesia dan IMF, sebagai syarat utama untuk mendapatkan pinjaman baru atau mengurangi pinjaman lama, bahkan indonesia sudah beberapa kali nyaris terjermus ke krisis utang luar negeri yang serius sejak era orde lama sehingga krisis keuangan asia 1997-1998. Pada saat krisis tersebut, indonesia mendapat bantuan yang besar dari IMF yang akhirnya dilunasi setelah beberapa tahun kemudian.

---

<sup>12</sup> Ahmad Mahyudi, *Ekonomi Pembangunan Dan Anlisis Data Empiris...*,238-239

Tingginya utang luar negeri dari banyak negara berkembang disebabkan oleh tiga jenis defisit : defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan (dalam literatur umum disebut trade gap). Dari faktor-faktor tersebut, defisit transaksi berjalan sering disebut dalam literatur sebagai penyebab utama membengkaknya utang luar negeri dari banyak negara berkembang. Besarnya defisit transaksi berjalan melebihi surplus neraca modal (CA) (kalau saldonya memang positif) mengakibatkan defisit neraca pembayaran (BoP), yang berarti cadangan devisa (VD) berkurang. Apabila tidak ada sumber-sumber lain (misalnya modal investasi dari luar negeri), seperti yang dialami oleh negara-negara yang dialami oleh negara-negara paling miskin di Benua Afrika. Padahal devisa sangat dibutuhkan terutama untuk membiayai impor barang-barang modal dan pembantu untuk kebutuhan kegiatan produksi di dalam negeri.

Dari uraian diatas, dapat dimengerti bahwa defisit transaksi berjalan yang terjadi terus menerus membuat banyak negara berkembang harus tetap bergantung pada pinjaman luar negeri (PLN), terutama negara-negara yang kondisi ekonomi domestiknya tidak menggairahkan investor-investor asing karena berbagai alasan seperti tidak ada kepastian hukum dan keamanan. Infrastruktur buruk, kebijakan ekonomi termasuk perdagangan luar negeri yang protektif kualitas SDM yang rendah, politik yang tidak stabil, dan lainnya. Sehingga sulit bagi negara-negara tersebut untuk mensubstitusikan PLN dengan

investasi, misalnya dalam bentuk penanaman modal asing (PMA).

Ketiga defisit tersebut, yang berkaitan satu sama lainnya dapat disederhanakan di dalam sebuah model yang terdiri dari beberapa persamaan berikut :

$$TB = (X-M) + F$$

Dimana X = ekspor barang dan jasa, M = impor barang dan jasa, F = transfer internasional atau arus modal masuk neto.<sup>13</sup>

#### 4. Teori Utang Luar Negeri

Pearson dan payaslian (1999) mengajukan empat teori mengenai bantuan luar negeri, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Aliran realis menyatakan bahwa tujuan utama dari bantuan luar negeri adalah bukan untuk menunjukkan idealisme abstrak aspirasi kemanusiaan, tetapi untuk proyeksi power nasional. Bantuan luar negeri merupakan komponen penting bagi kebijakan keamanan internasional.
- b. Teori ketergantungan (dependensia) menyatakan bahwa bantuan luar negeri digunakan oleh negara kaya untuk mempengaruhi hubungan domestik dan luar negeri negara penerima bantuan, merangkul elit politik lokal di negara penerima bantuan untuk tujuan komersil dan keamanan nasional. Kemudian, melalui jaringan internasional, keuangan internasional dan struktur produksi, bantuan luar

---

<sup>13</sup>Tulus Th Tambunan, *Perekonomian Indonesia...*,255-257

<sup>14</sup>Jilius R Latumaerissa, *Perekonomian Indonesia Dan Dinamika Ekonomi Global...*,242-243

negeri digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya alam negara penerima bantuan. Sehingga para penganut teori dependensia, menganggap bahwa bantuan luar negeri dapat digunakan sebagai sebuah instrumen untuk perlindungan dan ekspansi negara kaya ke negara miskin, sebuah sistem untuk mengekalkan ketergantungan.

- c. Aliran moralis atau idealis menyatakan bahwa bantuan luar negeri secara esensial merupakan gerakan kemanusiaan yang menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan internasional. Menurut aliran idealis, negara yang lebih kaya memiliki tanggung jawab moral untuk mempererat kerja sama utara selatan yang lebih besar dan merespon kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial di selatan. Maka kaum moralis berpendapat bahwa bantuan luar negeri mendorong dukungan yang saling menguntungkan (mutual supportive) dan hubungan menguntungkan sejalan dengan pembangunan ekonomi dan hak asasi manusia, hukum dan ketertiban internasional.
- d. Teori bureaucratic incrementalist menyatakan bahwa bantuan luar negeri sebagai kebijakan publik, produk dari politik domestik yang melibatkan opini publik, kelompok kepentingan, dan institusi pemerintah yang secara langsung terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang mempromosikan kepentingan nasional melalui agenda politiknya. Teori ini juga mengatakan bahwa tujuan yang dikejar negara donor dalam lingkup kepentingan ekonomi politik internasional, antara lain: kombinasi tujuan kemanusiaan, geopolitik, ideologi, kepentingan komersil,

masalah lingkungan dan berbagai faktor dalam politik domestik.

## 5. Masalah utang luar negeri

Selama 1970-an dan diawal 1980-an, negara berkembang menghimpun total utang luar negeri yang melampaui \$1 triliun, yang sangat sulit bagi mereka untuk melunasinya (yakni, membayar kembali pokok atau bahkan membayar bunganya). Kesulitan ini secara sirius menghambat rencana pembangunannya selama 1980-an. Utang tersebut timbul sewaktu banyak negara berkembang yang menijam besar-besaran dari bank swasta di negara maju untuk membiayai kebutuhan modalnyabyang tumbuh dan untuk membayar tagihan minyak yang sangat tinggi selama 1970-an semuanya dalam menghadapi lambatnya perluasan ekspor ke negara maju (sewaktu negara maju memasuki, periode pertumbuhan lambat), semakin rendahnya komoditas ekspor, dan semakin tingginya suku bunga. Dengan banyak meminjam dari luar, negara maju berlanjut tumbuh pada tingkat yang relatif cepat bahkan selama pertengahan kedua 1979-an. Akan tetapi diawal 1989-an, besar dan cepatnya utang luar negeri menjebak mereka dan kegagalan berskala besar hanya dapat dihindari dengan mengulangi campur tangan resmi berskala besar oleh international Monetary Fund (IMF).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Dominick Salvatore, *Ekonomi Internasional* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 365

Terdapat empat masalah yang ditimbulkan utang luar negeri tersebut.<sup>16</sup>

- a. Tidak seperti yang dipahami oleh banyak kalangan, khususnya masyarakat awam, utang luar negeri tidak datang dalam wujud uang, melainkan sebagian besar dalam bentuk barang atau teknologi. Dengan keadaan seperti ini, gangguan utang luar negeri menjadi tidak fleksibel, karena produk atau teknologi tersebut jelas hanya bisa digunakan untuk program-program tertentu saja. Mekanisme itu bisa terjadi mengingat prosedur pemberian utang adalah melalui seleksi proposal yang berisi program-program yang sudah direncanakan, dan jika sudah disetujui maka kebutuhan program itu akan diwujudkan dalam bentuk barang atau teknologi, bukan uang.
- b. Karena yang datang adalah barang atau teknologi, kemungkinan yang muncul adalah barang atau teknologi tersebut sesungguhnya tidak lagi sesuai dengan program yang digunakan, baik menyangkut kesesuaian maupun kualitas dan teknologi yang bersangkutan. Dan segi kesesuaian maupun kualitas, jika misalnya negara berkembang diberi pilihan, seharusnya negara debitur bisa membeli barang atau teknologi dan berbagai macam negara yang dipandang lebih mampu menjamin kesesuaian dan kualitas dan keberhasilan program yang hendak dilakukan. Sementara dengan pola demikian, debitur tidak memiliki alternatif untuk melakukan pilihan. Faktor ini semakin

---

<sup>16</sup>Jilius R Latumaerissa, *Perekonomian Indonesia...*,243-244

memperkuat keyakinan, bahwa utang luar negeri lebih banyak sebagai instrumen bagi negara maju untuk menjual barang dan teknologinya kepada negara-negara berkembang dan sangat mungkin itu adalah produk-produk yang sudah kadaluarsa di negara asalnya.

- c. Sudah menjadi persyaratan bahwa setiap program yang disetujui selalu disertai dengan mengikutsertakan konsultan asing (dari negara donor) dengan dalih untuk memonitor pelaksanaan dan program tersebut. Padahal, sejatinya konsultan asing itu lebih banyak berperan untuk menentukan kemana arah dan program itu dilakukan, baik secara konseptual maupun teknis. Ini jelas menimbulkan persoalan, karena konsultan asing pasti mewakili kepentingan negara donor untuk mengamankan keberlanjutan program sesuai dengan sangat mahal, melebihi gaji rata-rata yang dibayarkan kepada pekerja Indonesia dengan kualifikasi yang sederajat. Dengan sendirinya hal ini memotong jumlah dana utang luar negeri yang sebenarnya bisa digunakan lebih banyak untuk mengerjakan program.
- d. Sering kali dibalik kesepakatan pemberian utang luar negeri itu dibarengi dengan kesanggupan dan negara berkembang untuk berbagi untuk kebijakan (ekonomi) dengan kepentingan negara-negara donor. Misalnya, negara donor mau memberikan utang asalkan negara penerima mau membuka sektor-sektor tertentu untuk dapat memasuki investasi asing. Atau, utang luar negeri akan ditandatangani asalkan produk dan negara-negara maju bisa masuk ke negara

berkembang. Fakta ini jelas menimbulkan implikasi yang tidak ringan, karena negara berkembang justru diberi perayaratan yang berat dan seluruhnya secara ekonomi tidak menguntungkan posisi negara berkembang secara tidak langsung, tetapi secara fundamental sesungguhnya kebijakan ekonomi sudah diatur oleh negara donor.

#### **6. Perkembangan utang luar negeri**

Utang luar negeri indonesia pada april 2014 tercatat sebesar \$276,6 miliar, tumbuh 7,6% dibandingkan dengan posisi april 2013. Posisi utang luar negeri pada april 2014 terdiri dari utang luar negeri sektor publik sebesar \$131,0 miliar dan utang luar negeri swktor swasta \$145,6 miliar. Dengan perkembangan ini, pertumbuhan tahunan utang luar negeri pada april 2014 tercatat lebih lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan maret 2014 sebesar 8,7 % (yoy). Perlambat pertumbuhan utang luar negeri pada april 2014 dipengaruhi pertumbuhan utang luar negeri sektor publik yang melambat. Utang sektor publik tumbuh sebesar 2,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 5,1% (yoy). Sementara itu, utang luar negeri sektor swasta tumbuh 13,0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 12,2% (yoy).

Berdasarkan jangka waktu, perlambatan pertumbuhan posisi utang luar negeri terjadi baik pada utang luar negeri jangka panjang maupun utang luar negeri jangka pendek. Utang luar negeri berjangka panjang pada april 2014 tumbuh 9,2% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan maret 2014 yang



sebesar 10,1% (yoy). Sementara itu utang luar negeri berjangka pendek tumbuh 0,3% (yoy), juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 2,4% (yoy). Pada april 2014, utang luar negeri berjangka panjang tercatat sebesar \$229,7 miliar, atau mencapai 83,0% dari total utang luar negeri. Dari jumlah tersebut, utang luar negeri berjangka panjang sektor publik mencapai \$124,9 miliar atau 95,1% dari total utang luar negeri sektor publik dan utang luar negeri berjangka panjang sektor swasta tercatat \$105,1 miliar atau 72,1% dari total utang luar negeri swasta. Pertumbuhan utang luar negeri swasta pada april 2014 tidak terlepas dari perkembangan utang luar negeri di beberapa sektor utama yakni sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan. Pertumbuhan utang luar negeri sektor industri pengolahan tercatat sebesar 14,2% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 8,5% (yoy). Pertumbuhan utang luar negeri sektor pertambangan juga meningkat dari 12,1% (yoy) pada bulan sebelumnya menjadi sebesar 15,2% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan utang luar negeri sektor listrik, gas dan air bersih yang selama 6 bulan terakhir mengalami kontraksi, pada april 2014 kembali tumbuh 1,3% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan utang luar negeri sektor keuangan tumbuh 12,7% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 14,0% (yoy). Sektor jasa-jasa, yang secara persentase hanya mencapai 0,7% dari utang luar negeri swasta, mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu 68,2% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar

65,5% (yoy). Bank Indonesia memandang bahwa perkembangan utang luar negeri sampai April 2014 masih cukup sehat dalam menopang ketahanan sektor eksternal. Meskipun demikian, Bank Indonesia akan tetap memantau perkembangan utang luar negeri, khususnya utang luar negeri swasta, sehingga utang luar negeri dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko stabilitas makro ekonomi.<sup>17</sup>

## 7. Modal Asing Sektor Swasta

Dari uraian terdahulu telah dapat disimpulkan bahwa masalah kekurangan dana untuk pembentukan modal bukan saja dihadapkan oleh sektor pemerintah tetapi juga oleh sektor swasta. Di negara berkembang kegiatan ekonomi yang diusahakan pihak swasta masih mempunyai kemungkinan untuk berkembang lebih cepat apabila tersedia lebih banyak modal dan kemampuan untuk menggunakan tambahan modal dengan lebih efektif. Seperti yang terjadi di sektor pemerintah, masalah tersebut dapat diatasi dengan memasukkan modal dari luar negeri, terutama dari negara maju.<sup>18</sup>

### a. Penanaman Modal Langsung

Disamping kegagalan kebijakan pengambilalihan usaha asing, giatnya usaha negara berkembang menarik modal langsung dari luar negeri disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, oleh kesadaran bahwa bantuan luar negeri

---

<sup>17</sup>Jilius R Latumaerissa, *Perekonomian Indonesia ...*, 248-249

<sup>18</sup>Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Kencana, 2011), 327-

dan pinjaman luar negeri masih belum cukup untuk mengatasi masalah jurang ganda-jurang tabungan dan jurang mata uang asing yang dihadapi. Seperti juga dengan bantuan luar negeri, penanaman modal asing dan khususnya penanaman modal asing akan mempertinggi tingkat penanaman modal dan selanjutnya mempercepat tingkat pembangunan ekonomi.

b. Penanaman Modal Portofolio

Selain berupa penanaman modal langsung, penanaman modal asing swasta dapat pula berupa penanaman modal portofolio. Ia merupakan penanaman modal dalam bentuk pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (*bond*) dan saham perusahaan-perusahaan di negara berkembang. Dalam pembangunan ekonomi, peran para penanam modal yang demikian hanya terbatas kepada menyediakan modal yang diperlukan untuk mengembangkan industri dan kegiatan modern lainnya.

c. Pinjaman Ekspor

Jenis modal asing swasta ketiga yang mengalir ke negara berkembang adalah pinjaman ekspor. Dalam teori pinjaman seperti ini merupakan pinjaman jangka pendek, yaitu memberi kesempatan kepada pengusaha atau badan-badan pemerintah di negara-negara berkembang untuk membeli alat-alat modal peralatan dalam bentuk kredit yang harus dibayar dalam jangka waktu lima tahun.

## 8. Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif Islam utang luar negeri dapat digolongkan kepada utang yang mengandung riba Nasi'ah. Dalam Islam konsep utang terdiri dari dua, utang melalui pinjaman dan utang melalui pembiayaan. Utang pinjaman bermakna utang yang muncul disebabkan oleh pinjaman, baik pinjaman uang maupun barang. Pinjaman ini akan dibayarkan kembali dengan jenis yang sama, pada masa yang telah disepakati dengan jumlah yang sama. Sedangkan utang melalui kontrak pembiayaan atau jual beli, seperti utang yang timbul karena adanya transaksi perdagangan, adalah bentuk utang yang berbeda dengan utang secara pinjaman, karena utang dalam bentuk ini mengindikasikan adanya pemindahan hak milik kepada orang lain kemudian pembayaran pokok utang dilakukan kembali secara tertunda pada masa yang disetujui.<sup>19</sup>

Dalam sistem ekonomi Islam prinsip utang sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Islam hanya mengenal adanya qardh hasan (hutang kebajikan) saja. Hutang boleh berbentuk apa saja, yakni uang atau barang, besar ataupun kecil, untuk keperluan pribadi atau bisnis, tapi hutang itu hanya boleh diberikan tanpa bunga. Bunga telah dilarang oleh Islam maka ia tidak

---

<sup>19</sup> Winda Afriyenis, "*Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*", (Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 1, No.1, Januari-Juni 2016 Universitas Putra Indonesia YPTK Padang), 15

<sup>20</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana. 2012), 245-246

boleh dipungut dari hutang dalam bentuk apapun. Allah SWT berfirman

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ  
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن  
 تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ لَفِي رُءُوسِ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Albaqarah: 278-279)<sup>21</sup>*

2. Oleh karenanya perjanjian verbal mengenai hutang dapat menimbulkan perselisihan, penipuan dan masalah hukum, maka kitab suci islam mewajibkan kedua belah pihak, melakukan kontrak hutang dengan tertulis disaksikan oleh dua orang saksi serta menetapkan syarat dan ketentuan pelunasanya. Allah SWT berfirman

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴿٢٨٢﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah*

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*,58-59

*seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...*” (Qs. Albaqarah: 282)<sup>22</sup>

3. Pemberi pinjaman atau kreditur boleh minta jaminan dalam bentuk aset ataupun harta dari debitur sebagai jaminan pelunasan hutang itu. Allah SWT berfirman

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ  
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Qs. Albaqarah: 283)<sup>23</sup>*

## 9. Hubungan Defisit Transaksi Berjalan Terhadap Utang Luar Negeri

Tingginya utang luar negeri dari banyak Negara berkembang disebabkan oleh tiga jenis defisit : defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan (dalam literatur umum disebut trade gap). Dari

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*,59

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*,60

faktor-faktor tersebut, defisit transaksi berjalan sering disebut dalam literatur sebagai penyebab utama membengkaknya utang luar negeri dari banyak negara berkembang. Besarnya defisit transaksi berjalan melebihi surplus neraca modal (CA) (kalau saldonya memang positif) mengakibatkan defisit neraca pembayaran (BoP), yang berarti cadangan devisa (VD) berkurang. Apabila tidak ada sumber-sumber lain (misalnya modal investasi dari luar negeri), seperti yang dialami oleh negara-negara yang dialami oleh negara-negara paling miskin di Benua Afrika. Padahal devisa sangat dibutuhkan terutama untuk membiayai impor barang-barang modal dan pembantu untuk kebutuhan kegiatan produksi di dalam negeri.

Dari uraian diatas, dapat dimengerti bahwa defisit transaksi berjalan yang terjadi terus menerus membuat banyak negara berkembang harus tetap bergantung pada pinjaman luar negeri (PLN), terutama negara-negara yang kondisi ekonomi domestiknya tidak menggairahkan investor-investor asing karena berbagai alasan seperti tidak ada kepastian hukum dan keamanan. Infrastruktur buruk, kebijakan ekonomi termasuk perdagangan luar negeri yang protektif kualitas SDM yang rendah, politik yang tidak stabil, dan lainnya. Sehingga sulit bagi negara-negara tersebut untuk mensubstitusikan PLN dengan investasi, misalnya dalam bentuk penanaman modal asing (PMA).

### **C. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang berjudul “Sustainabilitas Defisit Transaksi Berjalan Perekonomian di Indonesia” dengan menggunakan metode

auto regressive distributed lags (ARDL). Data yang digunakan adalah data skunder periode 1997-2012.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa defisit transaksi berjalan yang terjadi di Indonesia sustainabel dalam jangka panjang dan jangka pendek.<sup>24</sup>

Penelitiannya berjudul “pengaruh defisit transaksi berjalan, kurs, inflasi terhadap utang luar negeri pemerintah sebelum dan sesudah krisis global 2008”, dalam periode 2004-2012. Variabel independen yang digunakan adalah utang luar negeri swasta pada periode tahun sebelumnya dan variabel dependennya adalah defisit transaksi berjalan, kurs, inflasi. Dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Data yang digunakan adalah data skunder.

Dalam fungsi sebagai berikut,  $Y = f(X_1, X_2, X_3, D)$  fungsi yang telah dijabarkan sebelumnya dimasukkan dalam bentuk regresi linier berganda pada ekonometrika sebagai berikut :

$$ULN = \text{Utang } Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu$$

$$ULN_p = \beta_0 + \beta_1 D + \beta_2 DTB + \beta_3 K + \beta_4 I + \mu$$

$$\text{Ln\_}ULN_p = \beta_0 + \beta_1 D + \beta_2 \text{Ln\_}DTB + \beta_3 \text{Ln\_}K + \beta_4 I + \mu$$

Dimana :

$ULN_p$  = Utang Luar Negeri Pemerintah

$D$  = Dummy (Krisis Global 2008)

0 = Sebelum Krisis Global, 1 = Seseudah Krisis Global

$DTB$  = Defisit Transaksi Berjalan

$K$  = Kurs

---

<sup>24</sup> Triono widodo, Lutzardo tobing, wahyu yuwana, "Sustainabilitas deficit transaksi berjalan di Indonesia", (working paper 14/2013, bank Indonesia), 31 diakses pada 17/07/16



$I$  = Inflasi

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = Koefisien Regresi

$\mu$  = Error Term<sup>25</sup>

Penelitiannya yang berjudul “faktor-faktor yang mempengaruhi utang luar negeri ” variabel independen dalam penelitian ini adalah utang luar negeri dan variabel dependennya adalah PDB, PDN, defisit anggaran dan ULN t-1. Dengan menggunakan regresi linear berganda, data yang digunakan adalah data kuantitatif skunder periode 1980-2004.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDB mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Utang Luar Negeri (ULN) dan Pengeluaran Dalam Negeri (PDN), Defisit Anggaran (DA) dan Utang luar negeri tahun sebelumnya (ULNt-1) masing-masing mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap variabel Utang Luar Negeri (ULN).<sup>26</sup>

Penelitiannya yang berjudul “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri” Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia”. Hasil kesimpulannya adalah utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang lazim dilakukan oleh Negara sedang berkembang, utang luar negeri Indonesia selama ini menganung system bunga yang dikenal

---

<sup>25</sup> Ella Dhanila Kartika Sari, "Pengaruh Defisit Transaksi Berjalan, Kurs, Dan Inflasi ...", 99

<sup>26</sup> Mahindun Dhiani Melda Harahap, "Analisi Faktor-faktor yang mempengaruhi utang luar negeri Indonesia", (Tesis Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Sumatera Utara Medan, 2007), 68 diakses pada 10/05/16

dengan riba nasi'ah, sehingga dalam pandangan islam utang luar negeri saat ini tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.<sup>27</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian sekarang yaitu penelitian saat ini hanya terdapat dua variabel yaitu satu variabel X dan variabel Y, dari data yang digunakan atau periode yang digunakan dalam penelitian, kemudian bentuk regresi yang digunakan dalam penelitian sekarang yaitu regresi sederhana, dan dari aplikasi pengolahan data yang berbeda, dan juga penelitian sekarang ini lebih memfokuskan kepada utang luar negeri swasta.

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.<sup>28</sup>

Maka dirumuskan hipotesis Sebagai Berikut :

- $H_a$  : Defisit Transaksi Berjalan Berpengaruh Signifikan Terhadap Utang Luar Negeri Swasta
- $H_0$  : Defisit Transaksi Berjalan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Utang Luar Negeri Swasta

---

<sup>27</sup> Winda Afriyenis, "*Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*", (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)-Volume 1, No.1, Januari-Juni 2016 universitas putra indonesia YPTK padang) , 15 diakses pada 25/03/16

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (bandung: Alfabeta, 2009), 96